

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan pertanian tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat tani. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pembangunan akan dinilai berhasil jika membawa perubahan kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga proses pembangunan pada hakikatnya merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dan keinginan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri (Iwan, 2010).

Dalam konteks pertanian, partisipasi petani menjadi penentu utama keberhasilan setiap program yang dirancang pemerintah. Tanpa keterlibatan aktif petani sebagai subjek, program apapun berisiko berjalan secara top-down dan tidak berkelanjutan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. (Sumardi, 2010). Dalam Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi yang ideal mencakup empat tahapan: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Kerangka ini menegaskan bahwa partisipasi yang bermakna tidak cukup diukur dari kehadiran fisik semata, melainkan dari keterlibatan aktif di seluruh siklus program. Uphoff (1988) selanjutnya menegaskan bahwa partisipasi aktif meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya dan menjamin keberlanjutan program pembangunan.

Sebagai respons terhadap pentingnya partisipasi petani tersebut, pendekatan penyuluhan pertanian terus berkembang menuju model yang lebih partisipatif, salah satunya melalui Sekolah Lapang. Sekolah Lapang adalah sekolah tanpa dinding, terbuka dan bersifat tidak formal dengan metode pendekatan Pendidikan Orang Dewasa (POD), guna mengembangkan dan memberdayakan petani melalui sistem

pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, (Kementerian Kehutanan 2012). Sekolah Lapang (SL) atau *Farmer Field School* (FFS) dirancang sebagai bentuk konkret pergeseran paradigma penyuluhan pertanian dari pendekatan top-down yang bersifat satu arah menuju pendekatan bottom-up yang bersifat partisipatif. Dalam kerangka SL, petani tidak diperlakukan sebagai penerima informasi pasif, melainkan sebagai pelaku, peneliti, dan manajer di lahannya sendiri, sementara penyuluh berperan sebagai fasilitator. Dasar hukum penyelenggaraan SL di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Pedoman Sekolah Lapang Pertanian.

Mengadopsi semangat pendekatan Sekolah Lapang inilah, Pemerintah Kabupaten Agam merancang sebuah program unggulan daerah yang disesuaikan dengan tantangan spesifik yang dihadapi petani setempat. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan peningkatan produksi padi sebesar 5–7% dalam satu tahun ke depan. Dalam rangka mewujudkan target tersebut sekaligus menjawab persoalan tingginya biaya produksi, Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Sekolah Lapang Sawah Pokok Murah (SLSPM) untuk pertama kali pada tahun 2025 di seluruh Kabupaten Agam. Program SLSPM merupakan program unggulan daerah yang didanai melalui Dana Desa/Nagari berdasarkan Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024. Salah satu lokasi pelaksanaannya adalah Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, dengan melibatkan 20 orang petani peserta pada lahan demplot seluas 1 hektar melalui 8 tahapan kegiatan yang telah ditetapkan.

Inovasi yang menjadi inti dari program SLSPM ini adalah metode sawah pokok murah (SPM), sebuah pendekatan budidaya padi yang secara selektif mengintegrasikan berbagai praktik pertanian alternatif yang dikenal efisien dan ramah lingkungan. Sawah Pokok Murah merupakan praktik bersawah yang secara selektif mengintegrasikan berbagai praktik bertani yang dianjurkan oleh gagasan-gagasan pertanian alternatif. Beberapa teknologi pertanian yang diadopsi dan dijadikan satu sistem oleh SPM antara lain penggunaan jerami sebagai mulsa sekaligus kompos langsung di lahan, teknologi Jajar Legowo, dan teknologi SRI (System of Rice Intensification), yang kesemuanya berfokus pada efisiensi penggunaan air, benih, dan pupuk, serta peningkatan produktivitas tanaman.

Metode ini menekankan pengelolaan tanaman, tanah, air, dan unsur hara secara lebih intensif dan efisien, dengan tujuan menekan biaya produksi, meningkatkan hasil panen, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, Sawah Pokok Murah memiliki maksud dan tujuan: (1) tidak membebani keluarga petani secara finansial; (2) mudah dilaksanakan; (3) tidak mengandung atau memperbesar risiko ekonomi maupun kesehatan yang dihadapi petani; (4) hemat sumber daya; (5) meminimalisir pencemaran dan emisi gas rumah kaca; serta (6) mendukung penciptaan ekosistem sawah yang lebih sehat sehingga mampu mendukung pertumbuhan tanaman yang produktif secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki tujuan yang relevan, SPM menyimpan persoalan mendasar yang membedakannya secara fundamental dari inovasi pertanian lain yang selama ini menjadi basis program penyuluhan nasional, yakni persoalan legitimasi ilmiah. Secara prosedural, sebuah metode budidaya baru harus melewati serangkaian tahapan yang ketat sebelum dapat ditetapkan sebagai rekomendasi teknologi nasional. Tahapan tersebut dimulai dari penelitian dan uji coba awal (demplot) oleh lembaga riset independen, dilanjutkan dengan verifikasi lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, uji adaptasi multilokasi sesuai standar SNI 9248:2024, publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi, hingga akhirnya ditetapkan sebagai rekomendasi resmi oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Metode Jajar Legowo, meskipun awalnya digagas oleh pejabat dinas pertanian lokal pada tahun 1996, telah melalui serangkaian penelitian dan pengkajian multilokasi oleh Balitbangtan sebelum mendapat rekomendasi nasional. Demikian pula SRI yang masuk ke Indonesia melalui kajian resmi lembaga riset negara sebelum disebarluaskan secara masif. Sementara itu, SPM merupakan inovasi yang digagas oleh individu dan dikembangkan oleh yayasan swasta, kemudian diadopsi langsung oleh Pemerintah Kabupaten Agam sebagai program unggulan daerah tanpa terlebih dahulu melalui proses verifikasi dan sertifikasi resmi dari Kementerian Pertanian.

Hal inilah yang membuat penelitian tentang partisipasi petani menarik untuk dilakukan. Penelitian terdahulu tentang partisipasi petani dalam program SL, seperti penelitian Erianti *et al.* (2023) tentang penerapan Jajar Legowo dan penelitian Kurniadi (2017) tentang SL-PHT, keduanya berfokus pada program berbasis

inovasi yang sudah memiliki legitimasi nasional dari Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, belum ada penelitian yang menganalisis secara sistematis bagaimana partisipasi petani terbentuk dalam program SL yang menggunakan inovasi dengan status legitimasi yang masih belum diakui secara nasional. Hal inilah yang menjadikan penelitian tentang partisipasi petani dalam program SLSPM di Nagari Kampung Tengah, sebagai lokasi pertama pelaksanaannya di Kecamatan Lubuk Basung pada tahun 2025, menjadi menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Sekolah Lapang sebagai metode penyuluhan partisipatif telah terbukti secara empiris mampu memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan metode penyuluhan konvensional. Waddington *et al.* (2014) dalam tinjauan sistematis terhadap 92 studi evaluasi dampak program *Farmer Field School (FFS)* di berbagai negara berkembang menyimpulkan bahwa metode ini secara konsisten meningkatkan pengetahuan teknis petani, mendorong adopsi praktik pertanian yang lebih baik, dan berkontribusi pada peningkatan produktivitas hasil panen. Keunggulan ini bersumber dari prinsip dasar SL sebagai metode penyuluhan yang menempatkan sawah sebagai ruang kelas nyata dan petani sebagai peneliti aktif di lahannya sendiri, bukan sekadar penerima informasi pasif. Leeuwis (2004) dalam *Communication for Rural Innovation* menegaskan bahwa inovasi pertanian tidak dapat disebarluaskan secara efektif hanya melalui transfer teknologi satu arah, melainkan harus melalui proses konstruksi sosial, pembelajaran kolektif, dan negosiasi makna antara seluruh pihak yang terlibat. Inilah landasan mengapa program Sekolah Lapang Sawah Pokok Murah (SLSPM) menggunakan metode SL sebagai metode penyuluhannya, karena inovasi SPM yang bersifat kompleks dan berbasis praktik langsung di lahan tidak memungkinkan untuk disampaikan melalui pendekatan ceramah semata.

Efektivitas SL sebagai metode penyuluhan partisipatif sangat ditentukan oleh sejauh mana partisipasi petani benar-benar terwujud dalam praktiknya, bukan hanya secara formal tertulis dalam desain program. Hal ini sejalan dengan pendapat Leeuwis (2004) menegaskan bahwa kualitas keterlibatan aktif peserta merupakan penentu utama keberhasilan sebuah metode penyuluhan partisipatif. Untuk

mengukur kualitas keterlibatan tersebut secara terstruktur, Cohen dan Uphoff (1980) menawarkan kerangka operasional yang membagi partisipasi ke dalam empat tahapan terukur, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program. Kerangka ini telah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang partisipasi petani dalam SL di Indonesia. Prayeti *et al.* (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Sijunjung menemukan bahwa meskipun tingkat partisipasi petani dalam program SL secara keseluruhan tergolong tinggi (76,36%), terdapat variasi partisipasi yang signifikan antar tahapan, khususnya partisipasi dalam pengambilan keputusan yang cenderung lebih rendah dibandingkan tahapan pelaksanaan. Sejalan dengan itu, Irvandika *et.al* (2024) dalam penelitian pada program Sekolah Lapang Climate Smart Agriculture di Kabupaten Jember menemukan bahwa frekuensi kehadiran dan keaktifan petani dalam setiap sesi berkorelasi positif dengan tingkat penerapan materi oleh petani. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa pengukuran partisipasi secara bertahap dan terstruktur bukan sekadar kepentingan akademik, melainkan instrumen evaluasi yang kritis untuk menilai apakah SL sebagai metode penyuluhan berfungsi sebagaimana mestinya.

Penelitian tentang partisipasi petani dalam program SL sudah cukup berkembang di Indonesia, namun masih terdapat celah penelitian yang belum terjawab hingga saat ini. Seluruh penelitian terdahulu, termasuk penelitian Erianti *et al.* (2023) tentang SL Jajar Legowo dan penelitian Kurniadi (2017) tentang SL-PHT, mengkaji partisipasi petani dalam program yang menggunakan inovasi dengan legitimasi nasional penuh dari Kementerian Pertanian. Belum ada satu pun kajian yang secara sistematis menganalisis bagaimana partisipasi petani terbentuk dalam program SL yang menggunakan inovasi yang statusnya secara nasional belum diakui secara resmi. Program SLSPM di Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, yang merupakan pelaksanaan pertama di Kabupaten Agam pada tahun 2025, menyajikan konteks tersebut secara nyata: sebuah program penyuluhan partisipatif berbasis inovasi yang belum memiliki sertifikasi dari Kementerian Pertanian, dilaksanakan di tingkat nagari melalui pendanaan Dana Desa. Kondisi ini menjadikan penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri yang belum pernah dikaji sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan program sekolah lapang sebagai metode penyuluhan partisipatif di Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung pada tahun 2025 berdasarkan 8 tahapan sekolah lapang sawah pokok murah?
2. Bagaimana tingkat partisipasi petani dalam kegiatan sekolah lapang di Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung pada tahun 2025 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis pelaksanaan kegiatan program sekolah lapang berdasarkan 8 tahapan sekolah lapang sawah pokok murah
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi petani dalam kegiatan sekolah lapang tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi petani: dengan adanya kegiatan sekolah lapang sawah pokok murah ini diharapkan dapat menekan biaya produksi terutama pada komoditas padi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan hasil panennya.
2. Bagi peneliti: dengan adanya program sekolah lapang sawah pokok murah ini, peneliti dapat melihat apa saja faktor faktor yang mempengaruhi minat petani untuk ikut serta dalam kegiatan sekolah lapang tersebut.

Bagi akademisi: dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah literatur tentang sekolah lapang. terutama dalam konteks keterlibatan petani dalam program berbasis pendidikan ini.